



LAPORAN BULAN MARET

TAHUN 2026

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua



Ringkasan Eksekutif

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua sepanjang Maret 2026 melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam empat klaster utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam. Kegiatan ini difokuskan pada konektivitas kerja BP3OKP/BPP. Secara umum, kegiatan bulan ini menunjukkan adanya penguatan koordinasi lintas sektor dan komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua, baik pada sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi program-program prioritas daerah.

Rekomendasi utama dari seluruh kegiatan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, BP3OKP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan pembangunan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan menuju visi Papua Emas 2041.





ALBERTH YOKU, S.Ag
Anggota BPP RI Provinsi Papua



1. Kegiatan Strategis

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP telah melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:



Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	1. Penyampaian peran Volunteer Peduli AIDS dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua. 2. Koordinasi dan sinkronisasi program berbasis Otonomi Khusus Papua. 3. Pembahasan peluang sinergi dan dukungan program antara BP3OKP dan Volunteer Peduli AIDS. PAPUA SEHAT	11.00 – 15.00 WIT (2 Maret 2026)	Menyediakan ruang diskusi bagi relawan untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman lapangan, serta tantangan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi penurunan fasilitas kesehatan dan anggaran program HIV/AIDS.• Terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS, terutama pada usia produktif (15–24 tahun).• Akses layanan dan distribusi ARV belum merata, khususnya di daerah terpencil.• Stigma masyarakat terhadap ODHA masih tinggi. Pemanfaatan dana Otsus sektor kesehatan belum optimal dirasakan.	
2.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua. PAPUA PRODUKTIF	11.00 – 15.00 WIT (3 Maret 2026)	Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk menyelaraskan langkah antar instansi agar pelaksanaan program PSR di Papua dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Fokus utamanya meliputi penyesuaian regulasi, penyelesaian permasalahan lahan, verifikasi data, serta upaya peningkatan produktivitas.	Tersusunnya pemetaan wilayah (roadmap), adanya komitmen lintas sektor, teridentifikasinya target luas lahan, serta penyederhanaan jalur birokrasi.	


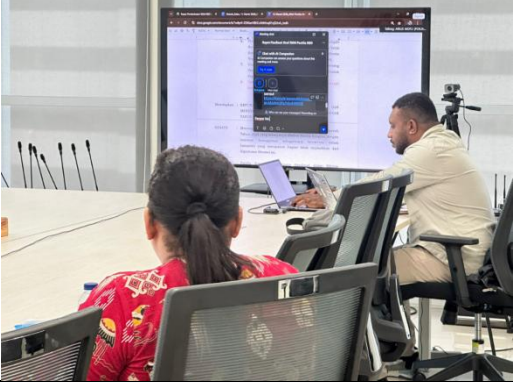



3.	ST-15_Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP.	5 – 7 Maret 2026	<p>Rapat ini membahas sejumlah program prioritas pemerintah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua, yang mencakup berbagai klaster Pokja BPP, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Polhukam, dan Papua Produktif. Pada klaster Papua Sehat, pembahasan difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Pada klaster Papua Cerdas, difokuskan pada penguatan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara pada klaster Papua Polhukam, dibahas upaya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan, termasuk penyelesaian konflik serta penguatan tata kelola pemerintahan. Adapun pada klaster Papua Produktif, pembahasan mencakup sektor perikanan, perizinan kapal, serta pengembangan pariwisata sebagai upaya mendorong pertumbuhan</p>		
----	--	------------------	--	--	--




			ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.		
4.	lanjutan rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom. PRODUKTIF	10.00 – 15.00 WIT (7 Maret 2026)	Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya pada tanggal 3/326 terkait rencana pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat(PSR)di Kab. Keerom guna memastikan kesiapan data, lokasi, kelembagaan, serta sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan implementasi program.	<ol style="list-style-type: none">1. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan di Bogor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSR.2. Direncanakan pelaksanaan kegiatan pembersihan (land clearing) pada lokasi yang telah ditetapkan.3. Akan diterbitkan surat keterangan lahan tidak bermasalah oleh Polres Keerom sebagai bentuk kepastian hukum.4. Dilakukan penguatan sistem sinkronisasi dan harmonisasi satu data antar instansi terkait guna mendukung akurasi dan integrasi data PSR.	
5.	Rapat lanjutan Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Ruang Rapat BPP It 5. PRODUKTIF	11.00 – 15.00 WIT (10 Maret 2026)	Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui peremajaan kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif, serta memperkuat sinkronisasi dan koordinasi antara Badan Pengarah Papua (BPP), Pemerintah Provinsi Papua, dan Kementerian Pertanian dalam kerangka kerja sama yang telah disepakati.	<ol style="list-style-type: none">1. Total potensi luas lahan mencapai ±3.000 hektare.2. Dari jumlah tersebut, sekitar 532 hektare dinilai telah siap secara administrasi dan data.3. Target awal pelaksanaan program ditetapkan sekitar 250 hektare.	



6.	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kondisi Pendidikan di Kabupaten Jayapura terkait Aksi Mogok Mengajar. PAPUA CERDAS	09.00 – 12.00 WIT (12 Maret 2026)	Mengidentifikasi titik permasalahan Aksi Mogok Mengajar Para Guru di Kab. Jayapura	- THR & Gaji-13 Tahun Anggaran 2025 yang belum dibayarkan Pemda mengusulkan untuk dilakukan pembayaran pada periode Triwulan 1 - 2	
7.	Rapat Finalisasi Draft RKM Panitia KBD PAPUA CERDAS	11.00 – 15.00 WIT (13 Maret 2026)	Menyelesaikan Draft yang akan di usulkan ke kemendikdasmen	- Draft perlu penyesuaian oleh Bidang Hukum kemendikdasmen	
8.	Rapat Internal membahas Perbaikan Pelayanan RSUD Yowari PAPUA SEHAT	09.00 – 11.00 WIT (17 Maret 2026)	Membahas upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Yowari.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi kendala pelayanan, fasilitas, dan sumber daya manusia.• Muncul sorotan publik terkait pelayanan, khususnya penanganan pasien darurat dan sistem rujukan.• Koordinasi antar fasilitas kesehatan dan internal rumah sakit belum optimal.	



				Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit perlu diperkuat.	
9.	Rapat Permasalahan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih PAPUA CERDAS	11.00 – 14.00 WIT (17 Maret 2026)	Menjawab permintaan audiensi oleh Kumpulan Mahasiswa FK Uncen	- Permasalahan administrasi status aktif Pembiayaan Uang Kuliah	
10.	Kegiatan Workshop Penyusunan Panduan Pembelajaran Berorientasi Pelestarian Noken Melalui Kokurikule Tahun 2026. PAPUA CERDAS	26 s.d. 28 Maret 2026	Mendampingi dan menghadiri kegiatan BGTK	Tersusnya Kurikulum Noken (KOKURIKULER) sebagai referensi bagi satuan Pendidikan dasar-menengah.	



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua

Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	1. Penyampaian peran Volunteer Peduli AIDS dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua. 2. Koordinasi dan sinkronisasi program berbasis Otonomi Khusus Papua. 3. Pembahasan peluang sinergi dan dukungan program antara BP3OKP dan Volunteer Peduli AIDS.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan koordinasi lintas instansi dan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah agar dapat memperluas akses layanan kesehatan, tenaga medis, dan distribusi ARV.• Memperkuat edukasi, khususnya bagi generasi muda, serta pendekatan berbasis agama dan budaya.• Mengkoordinasikan mengoptimalkan pemanfaatan dana Otsus untuk program HIV/AIDS secara tepat sasaran.• Mendorong pengurangan stigma melalui sosialisasi dan pendampingan ODHA.
2.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua.	<p>Mendorong percepatan hilirisasi kelapa sawit skala kecil yang dikelola oleh koperasi Orang Asli Papua (OAP), sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.</p> <p>Selain itu, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penerapan sistem pelayanan satu pintu, agar proses penyaluran dana hibah PSR dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani, khususnya di Kabupaten Keerom.</p>
3.	ST-15_Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPP. P.	Mendorong transformasi pemanfaatan Dana Otsus, dari yang semula berfokus pada belanja modal menjadi investasi yang lebih tepat guna, khususnya pada sektor perikanan seperti pembangunan dan optimalisasi cold storage, sesuai dengan arahan Presiden.
4.	lanjutan rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom.	<ul style="list-style-type: none">• Segera mengimplementasikan sistem sinkronisasi dan harmonisasi satu data guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan serta meningkatkan akurasi data.• Memastikan data petani penerima manfaat telah terverifikasi secara digital untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program PSR.
5.	Rapat lanjutan Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Ruang Rapat BPP It 5.	<ul style="list-style-type: none">• Segera mengimplementasikan sistem sinkronisasi dan harmonisasi satu data guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan serta meningkatkan akurasi data.• Memastikan data petani penerima manfaat telah terverifikasi secara digital untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program PSR.
6.	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kondisi Pendidikan di Kabupaten Jayapura terkait Aksi Mogok Mengajar.	Perlu dilakukan monitoring berkala untuk memastikan hak-hak guru terbayarkan



7.	Rapat Finalisasi Draf RKM Panitia KBD	Perlu koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana atau tuan rumah kongres.
8.	Rapat Internal membahas Perbaikan Pelayanan RSUD Yowari	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pada penanganan pasien darurat dan sistem rujukan.• Memperkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan dan internal RS.• Meningkatkan pengawasan serta evaluasi berkala untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi.• Mendorong transparansi dan komunikasi publik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
9.	Rapat Permasalahan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih	Perlu koordinasi dengan Pihak Civitas-akademik Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih
10	Kegiatan Workshop Penyusunan Panduan Pembelajaran Berorientasi Pelestarian Noken Melalui Kokurikule Tahun 2026	Koordinasi Bersama pemda untuk pelaksanaan di tahun 2027

Berdasarkan pelaksanaan berbagai kegiatan strategis oleh Anggota Badan dan Pokja BP3OKP di Provinsi Papua, dapat disimpulkan bahwa upaya percepatan pembangunan telah berjalan melalui forum koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi lintas sektor yang mencakup klaster Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Polhukam, dan Papua Produktif.

Pada klaster **Papua Sehat**, masih terdapat tantangan serius seperti peningkatan kasus HIV/AIDS, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, distribusi layanan yang belum merata, serta masih tingginya stigma masyarakat. Selain itu, pelayanan kesehatan di fasilitas seperti RSUD juga masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pada klaster **Papua Cerdas**, permasalahan utama meliputi kesejahteraan tenaga pendidik, seperti keterlambatan pembayaran hak guru, serta isu administratif dan pembiayaan pendidikan. Di sisi lain, terdapat kemajuan dalam penyusunan kurikulum berbasis kearifan lokal, seperti pengembangan kurikulum noken.

Pada klaster **Papua Produktif**, khususnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), telah menunjukkan progres melalui penyusunan roadmap, komitmen lintas sektor, serta penetapan target lahan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data, konflik lahan, permasalahan hukum, serta rendahnya kepercayaan petani terhadap program pemerintah.

Sementara itu, pada klaster **Papua Polhukam**, upaya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dalam penanganan konflik sosial dan sengketa lahan.




Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua



Secara umum, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek koordinasi dan perencanaan. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi di lapangan, khususnya terkait sinkronisasi data, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua.




Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua
Papua Produktif Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua	11.00 – 15.00 WIT (3 Maret 2026)	Tujuan utama dari Koordinasi ini adalah: menyelaraskan langkah antar instansi agar program PSR di Papua berjalan lebih cepat. 1. Penyelarasan regulasi. 2. Penyelesaian masalah lahan. 3. Verifikasi data. 4. Peningkatan Produktivitas.	Dari hasil Sinkronisasi tersebut, diperoleh beberapa poin pencapaian sbb: 1. Pemetaan wilayah (Roadmap) 2. Komitmen lintas Sektor. 3. Identifikasi target luas lahan. 4. Penyeder-hanaan Jalur Birokrasi.	
2.	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPP	(5 – 7 Maret 2026)	Membahas beberapa proyek pemerintah antara lain perikanan, ijin kapal serta pariwisata.	1. Tepat guna anggaran dana otsus 2. Penilaian objektif kepada perusahaan mitra. 3. Pembagian peran guna memantapkan berkolaborasi	





3.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	10.00 – 15.00 WIT (7 Maret 2026)	Tindak Lanjut pertemuan sebelumnya(3 Maret) tentang rencana PSR di Kab. Keerom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tandatanganan kontrak sudah dilakukan di Bogor. 2. Rencana bersih-bersih lokasi 3. Terbitkan surat keterangan lahan tidak bermasalah dari pihak PolRes Keerom. 4. Sistem sinkronisasi & harmonisasi satu data. 	
4.	Rapat lanjutan Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	11.00 – 15.00 WIT (10 Maret 2026)	<p>Akselerasi Program: Mempercepat Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2026 di Kab. Keerom yg merupakan bagian dari Program Strategi Nasional (PSN).</p> <p>Peningkatan Produktivitas: Meremajakan kebun kelapa sawit yg sudah tidak produktif guna meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani.</p> <p>Sinkronisasi Strategis: Memperkuat koordinasi antara Badan Pengarah Papua (BPP), Pemprov Papua, dan Kementerian</p>	<p>Rapat berakhir dengan beberapa hasil yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total luas lahan sekitar 3000 ha, dengan 532 ha dinilai siap secara administratif & data, dengan target awal pelaksanaan sekitar 250 ha. 2. Masih terdapat beberapa hambatan riil seperti Ketidaksesuaian data, permasalahan hukum dan kontrak, konflik lahan, serta kepercayaan petani terhadap program pemerintah 	



			Pertanian dalam Kerangka Kontrak kerja sama yang telah disepakati.		
5.	Kegiatan Penanaman Pohon Sagu oleh Persekutuan Bapak (PKB) GKI Sentani	10.00 – 14.00 WIT (30 Maret 2026)	Tujuan dari kunjungan ini adalah: <ul style="list-style-type: none">• Meninjau secara langsung, permasalahan yang terjadi di RSUD Yowari(acuan bagi RSUD lainnya).• Mendengar aspirasi dari pihak RSUD Yowari.• Memberikan solusi serta arahan tindak lanjut.	Hasil pertemuan dalam hal ini arahan ibu WaMendagri sbb: <ul style="list-style-type: none">• Tingkatkan Koordinasi, turunkan ego sectoral• Benahi pengurusan sertifikat tanah• Kadis Kesehatan Kab. Jayapura segera ambil solusi pasien yang menumpuk.• Wagub dan Bupati lakukan pergeseran anggaran untuk Menambah tempat tidur IGD, Memperbaiki ruangan, menyediakan makanan bagi pasien.• Koordinasi dengan DinSos untuk pasien tidak mampu/tanpa keluarga.• Sinkronisasi Dinsos-Dukcapil terkait pengaktifan kartu BPJS.• Sekda fasilitasi system rujukan terintegrasi antar RS Yowari-Dok II-Abe-Swasta)	



6.	Workshop Penyusunan Panduan Pembelajaran Berorientasi Pelestarian Noken Melalui Kokurikuler	26 – 28 Maret 2026	Tujuan dari Program ini adalah untuk melestarikan noken yang merupakan warisan dunia tak benda kepada generasi penerus bangsa yang dewasa ini kesulitan dalam menjahit noken.	Kegiatan ini dilakukan oleh BGTK kepada Guru-guru SD-SMP se-Kota-Kab. Jayapura. Hasil yang diraih adalah Guru-guru memiliki metode pembelajaran baru terkait pelestarian noken, yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran, agar siswa memiliki <i>soft skill</i> yaitu menjahit noken.	
7.	Kegiatan Penanaman 1000 Pohon Sagu oleh Persekutuan Kaum Bapak (PKB) GKI Klasis Sentani	10.00 – 14.00 WIT (30 Maret 2026)	Menanam 1000 pohon Sagu sebagai persiapan dalam menghadapi krisis pangan dunia.	Kegiatan penanaman 30 pohon sagu secara simbolis, telah dilakukan bersama Bupati, DPR, PKB, juga TNI/POLRI.	



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua

Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua
Papua Produktif Perwakilan Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua	Untuk memastikan keberlanjutan program PSR Prov. Papua, berikut beberapa rekomendasi 1. Pemerintah segera melakukan hilirisasi sawit skala kecil yang dikelola koperasi OAP. 2. Pemerintah segera sederhanakan birokrasi melalui system satu pintu agar dana hibah PSR cepat terserap oleh petani kab. Keerom
2.	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPP	Rekomendasi terbaik yang dapat kami sampaikan adalah, lakukan transformasi penggunaan Dana Otsus dari Belanja Modal menjadi Investasi Tepat Guna pada sector perikanan seperti cold storage sesuai instruksi Presiden.
3.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	1. Segera implementasikan Sistem Sinkronisasi & Harmonisasi Satu Data, untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan lahan. 2. Pastikan data petani penerima manfaat sudah terverifikasi secara digital untuk transparansi total.
4.	Rapat lanjutan Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Rekomendasi serta tindak lanjut yang akan diampuh antara lain: 1. Sinkronisasi dan Validasi Data 2. Verifikasi & Pemetaan lahan 3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sector 4. Serta sosialisai intensif guna memberikan pemahaman terkait manfaat, mekanisme dan legalitas program PSR.
5.	Kegiatan Penanaman Pohon Sagu oleh Persekutuan Bapak (PKB) GKI Sentani	Rekomendasi yang dapat dilakukan bersama adalah; 1. Koordinasi aktif antar pihak terkait guna keberhasilan bersama 2. Memfokuskan kelolaan anggaran RSUD Yowari pada peningkatan fasilitas serta peralatan kesehatan. 3. Kerjasama dengan pihak POLRI terkait pengaman wilayah rumah sakit 4. Penguatan peran puskesmas dalam hal ini petugas puskesmas turun langsung ke rumah warga.
6.	Workshop Penyusunan Panduan Pembelajaran Berorientasi Pelestarian Noken Melalui Kokurikuler	Kegiatan ini dilakukan oleh BGTK kepada Guru-guru SD-SMP se-Kota-Kab. Jayapura. Hasil yang diraih adalah Guru-guru memiliki metode pembelajaran baru terkait pelestarian noken, yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran
7.	Kegiatan Penanaman 1000 Pohon Sagu oleh Persekutuan Kaum Bapak (PKB) GKI Klasis Sentani	Berikut beberapa rekomendasi penting: 1. Penanaman pohon sagu harus terus dilakukan. 2. Melakukan penelitian lanjutan terkait metode penanaman serta kualitas sagu unggulan. 3. Penanaman pohon sagu pada zona sempadan Sungai juga danau perlu dilakukan.



Kesimpulan Keseluruhan Kegiatan Pokja BPP Papua Produktif Bulan Maret 2026 :

BP3OKP telah berhasil mengkonsolidasikan langkah nyata dalam memperkuat ketahanan nasional melalui optimalisasi sektor unggulan di Papua yang selaras dengan visi swasembada pemerintah.

Pertama, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom menjadi tonggak hilirisasi sawit skala kecil berbasis koperasi Orang Asli Papua (OAP), guna memutus rantai birokrasi serta meningkatkan kesejahteraan petani secara langsung.

Kedua, transformasi Dana Otonomi Khusus diarahkan pada investasi yang tepat guna, seperti penyediaan cold storage pada sektor perikanan, guna meningkatkan efisiensi anggaran serta menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Ketiga, penguatan layanan dasar melalui intervensi langsung di RSUD Yowari menunjukkan kehadiran negara dalam membenahi fasilitas kesehatan, sekaligus mendorong integrasi sistem rujukan medis yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan yang humanis.



Keempat, pelestarian budaya melalui Workshop Noken bagi tenaga pendidik memberikan pemahaman baru dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum, guna membentuk karakter dan soft skill generasi muda Papua.

Kelima, aksi penanaman 1.000 pohon sagu sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi krisis pangan global menegaskan peran strategis Papua sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia.


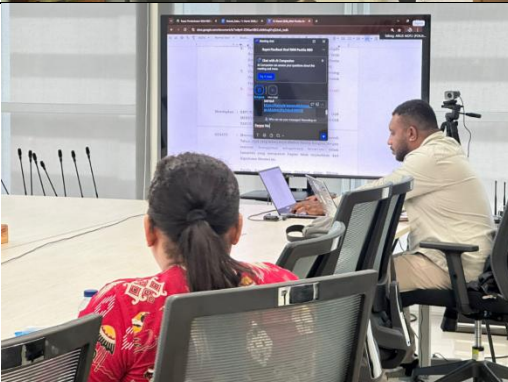

Seluruh rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen BP3OKP dalam memperkuat sinkronisasi data serta kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan pembangunan Papua yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.



Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua
Papua Cerdas Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPP	(5 – 7 Maret 2026)	SEKBPP	-	
2.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	10.00 – 15.00 WIT (7 Maret 2026)	Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya pada tanggal 3/326 terkait rencana pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat(PSR)di Kab. Keerom guna memastikan kesiapan data, lokasi, kelembagaan, serta sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan implementasi program.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan di Bogor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PSR. 2. Direncanakan pelaksanaan kegiatan pembersihan (land clearing) pada lokasi yang telah ditetapkan. 3. Akan diterbitkan surat keterangan lahan tidak bermasalah oleh Polres Keerom sebagai bentuk kepastian hukum. 4. Dilakukan penguatan sistem sinkronisasi dan harmonisasi satu data antar instansi terkait guna mendukung akurasi dan integrasi data PSR. 	



3.	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kondisi Pendidikan di Kabupaten Jayapura terkait Aksi Mogok Mengajar	09.00 – 14.00 WIT (12 Maret 2026)	Mengidentifikasi titik permasalahan Aksi Mogok Mengajar Para Guru di Kab. Jayapura	<ul style="list-style-type: none">- THR & Gaji-13 Tahun Anggaran 2025 yang belum dibayarkan- Pemda mengusulkan untuk dilakukan pembayaran pada periode Triwulan 1 - 2	
4.	Rapat Finalisasi Draft RKM Panitia KBD	11.00 – 15.00 WIT (13 Maret 2026)	Menyelesaikan Draft yang akan di usulkan ke kemendikdasmen	<ul style="list-style-type: none">- Draft perlu penyesuaian oleh Bidang Hukum kemendikdasmen	
5.	Rapat Internal membahas Perbaikan Pelayanan RSUD Yowari	09.00 – 11.00 WIT (17 Maret 2026)	Membahas kualitas pelayanan di RSUD Yowari yang menjadi keluhan masyarakat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi kendala pada pelayanan, fasilitas, dan SDM.• Pelayanan darurat dan sistem rujukan menjadi sorotan publik.• Koordinasi antar fasilitas kesehatan dan internal RS belum optimal.• Kepercayaan masyarakat masih perlu diperkuat.	



6.	Rapat Permasalahan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih	11.00 – 13.00 WIT (17 Maret 2026)	Menjawab permintaan audiensi oleh Kumpulan Mahasiswa FK Uncen	<ul style="list-style-type: none">- Permasalahan administrasi status aktif- Pembiayaan Uang Kuliah	
7.	Kegiatan Workshop Penyusunan Panduan Pembelajaran Berorientasi Pelestarian Noken Melalui Kokurikule Tahun 2026	(26 s.d. 28 Maret 2026)	Mendampingi dan menghadiri kegiatan BGTK	<ul style="list-style-type: none">- Tersusunya Kurikulum Noken (KOKURIKULER) sebagai referensi bagi satuan Pendidikan dasar-menengah.	



Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua
Papua Produktif Perwakilan Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP	-
2.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	1. Segera mengimplementasikan sistem sinkronisasi dan harmonisasi satu data guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan serta meningkatkan akurasi data. 2. Memastikan data petani penerima manfaat telah terverifikasi secara digital untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program PSR.
3.	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kondisi Pendidikan di Kabupaten Jayapura terkait Aksi Mogok Mengajar	Perlu dilakukan monitoring berkala untuk memastikan hak-hak guru terbayarkan
4.	Rapat Finalisasi Draf RKM Panitia KBD	Perlu koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana atau tuan rumah kongres.
5.	Rapat Internal membahas Perbaikan Pelayanan RSUD Yowari	Meningkatkan pelayanan, khususnya darurat dan rujukan.
6.	Rapat Permasalahan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih	Perlu koordinasi dengan Pihak Civitas-akademik Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih
7.	Kegiatan Workshop Penyusunan Panduan Pembelajaran Berorientasi Pelestarian Noken Melalui Kokurikule Tahun 2026	Koordinasi Bersama pemda untuk pelaksanaan di tahun 2027

Kesimpulan Keseluruhan Kegiatan Pokja BPP Papua Cerdas Bulan Maret 2026 :

Secara keseluruhan, Pokja Papua Cerdas Provinsi Papua


Dokumen ini memuat rangkaian kegiatan strategis pada Maret 2026 yang berfokus pada penyelesaian isu pendidikan, kelembagaan, dan kemahasiswaan di Papua, meliputi penanganan aksi mogok guru akibat belum dibayarkannya THR dan gaji ke-13, finalisasi draf RKM yang masih memerlukan penyesuaian hukum, pembahasan masalah administrasi dan pembiayaan mahasiswa Fakultas Kedokteran Uncen, serta penyusunan kurikulum berbasis pelestarian Noken sebagai referensi pendidikan; secara umum, kegiatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dan tindak lanjut berkelanjutan.

Poin-poin utama:

- Aksi mogok guru disebabkan oleh belum dibayarkannya THR dan gaji ke-13 TA 2025
- Draf RKM Panitia KBD masih perlu penyesuaian oleh Bidang Hukum Kemendikdasmen
- Permasalahan mahasiswa FK Uncen terkait status aktif dan pembiayaan kuliah
- Tersusunnya kurikulum Noken (kokurikuler) untuk pendidikan dasar dan menengah
- Perlu monitoring berkala dan koordinasi lanjutan dengan pemda serta pihak terkait




Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua
Papua Polhukam Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Koordinasi hasil penanganan pelaku aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Keerom, Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, Jalan Raya Abepura, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.	11.00 – 15.00 WIT (2 Maret 2026)	Koordinasi hasil penanganan pelaku aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Keerom yang dilaksanakan di PN Jayapura pada dasarnya bertujuan memastikan proses penegakan hukum berjalan tuntas, terkoordinasi lintas lembaga, dan diikuti langkah pencegahan agar tambang ilegal tidak berulang. Hasil dan rekomendasi yang diharapkan mencakup kepastian proses hukum para pelaku, pemulihan lingkungan, perlindungan hak ulayat, dan penguatan sistem pengawasan di perbatasan Keerom–Jayapura. Tujuan kegiatan koordinasi: <ul style="list-style-type: none">Menyelaraskan pemahaman dan langkah antara penyidik (Polda	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya notulen/berita acara koordinasi yang memuat: kronologi penanganan, posisi hukum masing-masing tersangka, status praperadilan (jika ada), rencana persidangan, dan penanganan barang bukti.Kepastian proses hukum: tersangka/terdakwa segera disidangkan, permohonan praperadilan yang tidak berdasar ditolak, dan perkara berjalan hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap.Adanya kesepakatan awal mengenai langkah lanjutan pasca-putusan (misalnya rencana penutupan total lokasi, pemulihan lingkungan, dan pemantauan wilayah tambang ilegal di Keerom). Menguatnya kerja sama kelembagaan antara Polda Papua, Kejaksaan, PN Jayapura, Pemprov/Pemkab, dan instansi teknis (ESDM, Imigrasi, KLHK) dalam penanganan kasus-kasus tambang ilegal berikutnya.	



			<p>Papua), kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Jayapura terkait perkara tambang emas ilegal di Keerom (Kali Pur, Distrik Senggi), termasuk status barang bukti, konstruksi pasal, dan tahapan persidangan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan proses penanganan pelaku, termasuk WNA dan WNI, berjalan transparan, profesional, serta menghormati ketentuan hukum nasional dan standar hak asasi manusia. <p>Mengidentifikasi implikasi kasus terhadap keamanan wilayah perbatasan, kerugian negara, dampak sosial- ekologis di Keerom dan Jayapura, serta tanggung jawab para pihak (pemerintah daerah, penegak</p>		
--	--	--	---	--	--





			hukum, pemilik hak ulayat)		
2.	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP	(5 s.d. 7 Maret 2026)	<p>Tujuan utama rapat koordinasi sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP adalah menyelaraskan program/kegiatan pusat-daerah dengan dokumen RAPPP agar percepatan pembangunan Papua terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan, khususnya OAP. Hasil paling relevan dan rekomendasi utamanya adalah adanya kesepakatan program prioritas, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD), serta komitmen pengawalan melalui kontrak kinerja dan mekanisme pemantauan bersama.</p> <p>Tujuan utama rapat koordinasi.</p> <ul style="list-style-type: none">Menjadikan RAPPP sebagai acuan/kompas utama dalam perencanaan dan	<p>Tersusunnya daftar program/kegiatan prioritas RAPPP yang sudah diselaraskan dengan RPJMD/RKPD dan rencana kerja K/L, termasuk lokasi, target sasaran (terutama OAP), dan pagu indikatif.</p> <ul style="list-style-type: none">Adanya kesepakatan teknis mengenai tata kelola data dan interoperabilitas sistem (misalnya SIPPP, SIPD, SIKD) untuk perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pembangunan Papua.Penandatanganan atau penguatan kontrak kinerja antara K/L dan pemda terkait pelaksanaan program RAPPP tahun berjalan, sehingga akuntabilitas dan pengawasan kinerja lebih jelas. <p>Terbangunnya pemahaman bersama mengenai peran Komite Eksekutif/struktur pengampu RAPPP dalam fungsi sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program percepatan pembangunan Papua</p>	



			<p>pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua jangka menengah (2025–2029), sebagai turunan RIPP 2022–2041.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyinkronkan program dan anggaran K/L, provinsi, dan kabupaten/kota dengan 19 program prioritas percepatan pembangunan Papua agar tidak lagi berjalan sektoral dan tumpang tindih.• Meningkatkan kolaborasi dan komitmen para pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemda, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan) untuk mendukung percepatan pembangunan yang berkeadilan bagi OAP.		
--	--	--	--	--	--




3.	Rapat lanjutan Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	10.00 – 15.00 WIT (7 Maret 2026)	<p>Kegiatan rapat lanjutan Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Kabupaten Keerom bertujuan menyatukan data, peran, dan langkah para pihak agar Peremajaan Sawit Rakyat benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi petani serta perekonomian daerah. Hasil dan rekomendasi yang diharapkan umumnya berupa kesepakatan teknis dan kelembagaan untuk menyelesaikan hambatan PSR, mempercepat realisasi lahan, dan menjamin pendampingan petani.</p> <p>Tujuan kegiatan rapat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyinkronkan data dan usulan PSR (luasan, lokasi, legalitas lahan, kelembagaan petani/koperasi) antara pusat,	<p>Adanya berita acara/risalah rapat yang memuat peta masalah PSR di Keerom, data usulan yang disepakati, dan daftar kebun prioritas yang akan diremajakan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terbitnya rencana aksi (action plan) percepatan PSR di Keerom yang memuat: target luasan, tahapan teknis, pendanaan (dana hibah PSR dan KUR), jadwal, dan penanggung jawab per kegiatan.• Terbangunnya mekanisme pendampingan petani (oleh dinas, perusahaan mitra, dan organisasi petani) sehingga kebun PSR tidak kembali menjadi semak belukar dan benar-benar produktif. <p>Menguatnya komitmen politik dan kelembagaan pemerintah daerah Keerom untuk menyelamatkan dan menggalakkan kembali kebun PSR, termasuk penindakan terhadap koperasi/pengelola yang merugikan petani.</p>	 



			<p>provinsi, dan Kabupaten Keerom agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebun “terbengkalai” seperti kasus 661 ha di Arso.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan peran BP3OKP, pmda, dinas teknis, BDPKS, perusahaan mitra, dan organisasi petani (misalnya Apkasindo) dalam percepatan pelaksanaan PSR di Keerom.• Mengidentifikasi secara spesifik hambatan di lapangan (koperasi bermasalah, pendampingan teknis lemah, bibit dan input terlambat, masalah status lahan) dan merumuskan solusi bersama.• Menetapkan rencana kerja dan jadwal percepatan, termasuk target luas replanting per tahun, tahapan		
--	--	--	---	--	--



			<p>kegiatan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas</p>		
4.	<p>Kegiatan dengar pendapat Anggota DPRDPRP kursi otsus</p>	<p>13.00 – 16.00 WIT (13 Maret 2026)</p>	<p>Kegiatan dengar pendapat dengan Anggota DPRDPRP dari kursi Otsus pada dasarnya bertujuan memastikan aspirasi Orang Asli Papua (OAP) benar-benar terartikulasi dalam kebijakan daerah, terutama yang terkait pelaksanaan Otonomi Khusus. Hasil yang diharapkan adalah adanya rekomendasi dan rumusan kebijakan yang lebih berpihak pada hak-hak OAP dan berkontribusi pada perbaikan tata kelola Otsus.</p> <p>Tujuan kegiatan dengar pendapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghimpun aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat adat/OAP secara langsung untuk kemudian diperjuangkan di DPRDPRP, sejalan dengan mandat 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya pokok-pokok pikiran/rekomendasi tertulis Anggota DPRDPRP kursi Otsus yang bersumber dari aspirasi masyarakat, untuk dibawa ke pembahasan DPRDPRP dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau pengawasan. Terwujudnya kebijakan dan program pembangunan yang lebih berpihak kepada OAP, termasuk perlindungan hak ulayat, penguatan lembaga adat, serta peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Otsus, karena masalah dan penyimpangan di lapangan diangkat dalam forum formal dan menjadi bahan pengawasan DPRDPRP terhadap pemerintah daerah. <p>Menguatnya posisi politik dan fungsi pengawasan Anggota DPRDPRP jalur Otsus sebagai representasi khusus OAP, sehingga keberadaan kursi Otsus tidak hanya simbolik tetapi efektif memengaruhi arah kebijakan</p>	



			<p>kursi Otsus sebagai instrumen keterwakilan politik OAP.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memperkuat fungsi representasi budaya dan sosial Anggota DPRD kursi Otsus agar suara komunitas adat masuk dalam proses penyusunan Perdasu/Perdasus dan kebijakan pembangunan.• Membangun komunikasi dan kepercayaan antara wakil OAP (kursi Otsus) dengan masyarakat, MRP, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain dalam kerangka pelaksanaan Otsus Papua.• Mengidentifikasi persoalan implementasi Otsus di lapangan (misalnya penggunaan dana, layanan dasar,		
--	--	--	---	--	--



			<p>perlindungan hak ulayat) untuk dijadikan bahan pengawasan dan evaluasi oleh DPRP.</p> <p>Penyelesaian dan pencarian solusi terkait masalah internal di DPRD provinsi Papua.</p>		
5.	<p>Sidang Adat dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di lokasi Brim Pever, Kampung Makmakerbo, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor</p>	<p>26 s.d. 28 Maret 2026</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mengharmonisasikan keputusan adat dengan kebijakan Otsus dan kepentingan pembangunan nasional/daerah, sejalan mandat BP3OKP untuk sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan pengawasan percepatan pembangunan Otsus Papua.• Mengumpulkan data, fakta, dan dinamika lapangan sebagai bahan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat/daerah terkait tata kelola tanah adat dan	<ul style="list-style-type: none">• Tercapainya keputusan Sidang Adat yang jelas mengenai status, pemilik hak, batas-batas, dan bentuk penyelesaian sengketa tanah Brim Pever (kompensasi, pengakuan hak, skema pemanfaatan bersama, dsb.) yang diakui oleh para pihak dan lembaga adat Byak.• Berkurangnya ketegangan dan potensi konflik sosial antara masyarakat adat, pemerintah, dan institusi negara (termasuk TNI/Polri) terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah adat di wilayah Byak.• Tersusunnya catatan resmi dan rekomendasi pokja Polhukam BP3OKP untuk:<ul style="list-style-type: none">a).Bahan koordinasi dengan Kemenko Polhukam, kementerian/lembaga teknis, dan Pemda Biak Numfor;b).Penguatan kebijakan pengakuan dan perlindungan tanah adat dalam kerangka Otsus Papua dan proyek pembangunan strategis.	 



			<p>proyek negara di wilayah Byak.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membangun kepercayaan masyarakat adat bahwa negara melalui BP3OKP hadir sebagai penengah yang menghargai mekanisme musyawarah dan peradilan adat, bukan sekadar mendorong proyek tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan.	<p>Terbangunnya model praktik baik penyelesaian sengketa tanah adat melalui peradilan adat yang bisa direplikasi di kasus tanah ulayat lain di Tanah Papua.</p>	
--	--	--	--	---	--



Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua
Papua Polhukam Perwakilan Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Koordinasi hasil penanganan pelaku aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Keerom, Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, Jalan Raya Abepura, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.	<p>1.Rekomendasi penegakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none">• Melanjutkan proses penuntutan secara konsisten terhadap para pelaku, termasuk korporasi/pemberi modal dan WNA, bukan hanya pekerja lapangan, untuk menimbulkan efek jera dan mencegah berulangnya tambang ilegal di Keerom.• Mengusulkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Imigrasi, dan instansi pusat lain untuk mengawasi perizinan, pergerakan WNA, serta aliran keuangan terkait aktivitas tambang ilegal.• Menetapkan mekanisme rutin pelaporan perkembangan perkara tambang ilegal (baik penyidikan maupun persidangan) kepada pemerintah daerah dan forum koordinasi penegakan hukum di Papua. <p>2.Rekomendasi lingkungan, sosial, dan hak ulayat</p> <ul style="list-style-type: none">• Melakukan penilaian kerusakan lingkungan pada lokasi tambang ilegal dan menyusun rencana pemulihan (rehabilitasi lahan, perlindungan DAS, dan pencegahan pencemaran) dengan melibatkan kementerian teknis dan pemda.• Memperkuat peran pemilik hak ulayat, ondoafi, dan tokoh adat dalam pengawasan wilayah agar tidak lagi memberikan atau "meminjamkan" lahan kepada pihak yang melakukan tambang ilegal.• Memasukkan aspek perlindungan masyarakat lokal (Kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial) dalam kebijakan penanganan tambang ilegal dan rencana pemulihan wilayah terdampak. <p>3.Rekomendasi pencegahan dan pengawasan ke depan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membentuk atau mengaktifkan forum koordinasi pengawasan tambang ilegal untuk wilayah Keerom–Jayapura (melibatkan Polda, TNI, Pemda, ESDM, BKSDA/KLHK, adat) yang melakukan patroli, intelijen, dan sosialisasi hukum secara berkala.• Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi (GIS, laporan masyarakat, pos perbatasan) di kawasan rawan seperti Sungai/Kali Pur, KM 30 Distrik Senggi, dan wilayah perbatasan lain yang berpotensi menjadi lokasi tambang emas ilegal.• Melaksanakan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya tambang ilegal (longsor, pencemaran, konflik sosial) dan



		risiko hukum, sebagaimana imbauan Pemkot Jayapura terkait penghentian aktivitas pendulangan emas ilegal.
2.	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP	<p>1. Rekomendasi utama rapat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menetapkan RAPPP sebagai rujukan wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Papua.• Memperkuat mandat dan kapasitas Komite Eksekutif/tim koordinasi RAPPP di pusat dan daerah untuk memastikan sinkronisasi program, monitoring realisasi, dan penyelesaian hambatan lintas sektor.• Mengarahkan prioritas program pada isu inti RAPPP: peningkatan SDM (pendidikan-kesehatan), ekonomi OAP, infrastruktur dasar, tata kelola dan keamanan, dengan indikator kinerja yang terukur dan dilaporkan setiap tahun.• Mengembangkan mekanisme pemantauan bersama (joint monitoring): laporan berkala, dashboard kinerja, dan forum review tahunan RAPPP untuk menilai capaian, kendala, dan penyesuaian program. <p>2. Rekomendasi lanjutan untuk implementasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan representasi OAP (MRP, DPRP/DPRK, lembaga adat) dalam perencanaan dan evaluasi program RAPPP agar keberpihakan kepada OAP benar-benar terwujud.• Mengintegrasikan pengawasan penggunaan Dana Otsus dan transfer lain dengan kerangka RAPPP sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat ditelusuri ke program dan indikator percepatan pembangunan Papua.
3.	Rapat lanjutan Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	<p>1. Rekomendasi teknis pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Menetapkan standar teknis kebun PSR di Keerom (kualitas bibit, pola tanam, pola tanam sela seperti jagung pada masa belum menghasilkan, pola pemeliharaan) agar produktivitas dan pendapatan petani meningkat.• Menyusun sistem monitoring dan evaluasi berkala (misalnya triwulanan) dengan indikator: luas tertanam, tingkat keberhasilan tanaman, penyerapan dana, dan pendapatan petani peserta PSR.• Mengatur pola kemitraan dengan perusahaan sawit di sekitar Keerom (offtaker, pendampingan teknis, akses pasar dan pupuk) sebagai strategi percepatan dan jaminan pasar tandan buah segar.



		<p>2.Rekomendasi untuk keberlanjutan dan perlindungan petani:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memperkuat peran organisasi petani (misalnya Apkasindo Papua) dalam pendampingan usulan dan pelaksanaan PSR agar petani tidak dirugikan lagi dan memiliki posisi tawar lebih baik. <p>Mengintegrasikan PSR dengan agenda pembangunan daerah: pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD Keerom melalui sektor perkebunan, sehingga program PSR menjadi prioritas lintas OPD.</p>
4.	Kegiatan dengar pendapat Anggota DPRP kursi otsus	<p>Rekomendasi yang paling relevan dari kegiatan dengar pendapat Anggota DPRP kursi Otsus Provinsi Papua dapat difokuskan pada penguatan perlindungan hak OAP, pembenahan tata kelola Otsus, dan penegasan fungsi representasi khusus OAP dalam kebijakan daerah. Rekomendasi berikut bisa dijadikan rumusan resmi (pokok-pokok pikiran) dari kegiatan dengar pendapat.</p> <p>1.Penguatan regulasi dan kelembagaan OAP.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendesak penyusunan dan percepatan penetapan Perdasus kunci: Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, Basis Data Pokok OAP, Kependudukan dan Ketenagakerjaan OAP, Malis/Peradilan Adat, serta Pengadaan Barang/Jasa yang berpihak pada Pengusaha Asli Papua.• Memastikan mekanisme pengangkatan anggota DPRP jalur Otsus benar-benar berbasis musyawarah adat dan lembaga representatif OAP, sehingga kursi Otsus tidak bersifat simbolik tetapi efektif mengartikulasikan kepentingan OAP. <p>2.Perbaikan tata kelola Dana Otsus</p> <ul style="list-style-type: none">• Merekomendasikan penyusunan grand design pembangunan Papua berbasis Otsus (2022–seterusnya) agar penggunaan dana lebih terarah dan terukur dampaknya bagi OAP.• Meminta penguatan sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan dana Otsus sampai ke kabupaten/kota dan kampung, termasuk laporan periodik yang mudah diakses publik dan melibatkan lembaga adat. <p>3.Afirmasi hak dasar OAP.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menegaskan prioritas kebijakan afirmatif di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, misalnya: beasiswa tenaga kesehatan OAP, peningkatan kapasitas SDM OAP, dan dukungan usaha bagi pengusaha asli Papua.• Mengusulkan penguatan ketentuan bahwa jabatan politik dan birokrasi strategis di Papua



		<p>diutamakan bagi OAP, sejalan dengan aspirasi perubahan UU Otsus yang mendorong kepala daerah dan pejabat kunci berasal dari OAP.</p> <p>4.Penguatan fungsi representasi kursi Otsus.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membentuk Fraksi Otsus atau forum khusus di DPRD yang beranggotakan wakil jalur Otsus untuk menyusun catatan strategis tahunan kepada pemerintah provinsi terkait implementasi Otsus dan pemenuhan hak OAP.• Menetapkan kewajiban formal bahwa setiap pembahasan Raperdasi/Raperdasus yang menyangkut hak OAP harus melalui konsultasi dan rekomendasi tertulis dari anggota DPRD kursi Otsus dan lembaga adat terkait. <p>Rekomendasi tindak lanjut teknis.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyusun laporan hasil dengar pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang dikirim resmi ke Pimpinan DPRD, Gubernur, MRP, dan bupati/wali kota, dilampiri daftar aspirasi per wilayah adat.• Menetapkan jadwal dengar pendapat berkala (misalnya per tahun atau per masa sidang) di lima wilayah adat sebagai bagian dari kalender resmi DPRD, sehingga pengawasan dan serapan aspirasi OAP berlangsung terstruktur. <p>Pemanggilan atau pertemuan lanjutan Bersama ketua DPRD Provinsi Papua,Setwan DPRD Provinsi Papua Bersama BP3OKP dan Anggota DPRD jalur Khusus atau Jalur pengangkatan (OTSUS).guna mencari solusi terkait permasalahan intenal yang ada.</p>
5.	Sidang Adat dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di lokasi Brim Pever, Kampung Makmakerbo, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor	<p>Rekomendasi pokja Polhukam BP3OKP dalam konteks Sidang Adat Brim Pever idealnya berfokus pada perlindungan hak masyarakat adat, koreksi pelanggaran prosedur, dan penataan ulang hubungan negara–masyarakat adat agar adil dan berkelanjutan. Rekomendasi juga perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan adat serta penyesuaian kebijakan pemerintah/TNI dengan prinsip HAM dan Otsus Papua.</p> <p>A.Rekomendasi terhadap proses dan keputusan adat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menegaskan agar keputusan Sidang Adat menghormati struktur dan kewenangan lembaga adat Byak yang sah, serta diambil melalui musyawarah yang melibatkan semua marga/pemilik hak yang terdampak.• Mendorong pencatatan resmi hasil Sidang Adat (berita acara, peta, keputusan) sebagai dokumen yang diakui pemerintah daerah dan dapat menjadi dasar koreksi kebijakan atau langkah hukum lebih lanjut bila perlu.• Mengusulkan agar keputusan adat secara tegas menyatakan larangan pengusuran



		<p>paksa dan pemanfaatan tanah tanpa persetujuan masyarakat adat dengan mekanisme sanksi adat bila dilanggar.</p> <p>B.Rekomendasi kepada pemerintah daerah dan TNI/instansi negara.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemerintah daerah dan TNI diminta tunduk pada putusan Sidang Adat terkait status dan pemanfaatan tanah Brim Pever, termasuk skema ganti rugi, pemulihan, atau pengembalian tanah bila disepakati demikian.• Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan/penggunaan tanah untuk pembangunan Markas Yonif 858 TP yang diduga menimbulkan pengusuran paksa, serta penanganan pelanggaran prosedur dan dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme yang kompeten (Komnas HAM, Kejaksaan, dll).• Mengusulkan penyusunan/percepatan regulasi daerah (Perdasus/Perdasi) yang memperjelas pengakuan tanah adat dan prosedur pemanfaatannya oleh negara, sejalan dengan dorongan BP3OKP agar hak masyarakat adat dituangkan dalam Perdasus. <p>C.Rekomendasi jangka panjang (pembangunan dan kelembagaan)</p> <ol style="list-style-type: none">a) Mendorong pemetaan partisipatif tanah adat di Biak Timur yang melibatkan lembaga adat, pemuda adat, dan Pemda sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pencegahan konflik berulang.b) Menguatkan lembaga peradilan adat melalui pelatihan, fasilitasi, dan dukungan anggaran Otsus, agar mampu menyelesaikan sengketa tanah secara berkeadilan dan diakui dalam sistem hukum positif.c) Menyarankan pembentukan forum tetap dialog negara–masyarakat adat (Pemda, TNI/Polri, BP3OKP, tokoh adat/agama/pemuda) di Biak Numfor untuk mengawal implementasi putusan adat dan merancang model penyelesaian sengketa tanah adat yang bisa direplikasi di wilayah lain Papua. <p>BP3OKP berperan sebagai pengarah, pengawal, dan penghubung kebijakan Otsus agar perlindungan hak tanah adat Papua benar-benar dijalankan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Peran ini tidak mengambil alih kewenangan adat, tetapi memastikan negara menghormati, memperkuat, dan mengintegrasikan hak tanah adat dalam kebijakan dan program pembangunan.</p> <p>1.Peran strategis pada level kebijakan.</p>
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong penyusunan dan percepatan Perdasus/Perda yang secara eksplisit mengatur hak masyarakat adat, termasuk tanah ulayat dan mekanisme pemanfaatannya oleh negara/investor.• Mengawal agar kebijakan Otsus sebagai kebijakan afirmatif benar-benar berpihak pada OAP, terutama soal pengakuan, perlindungan, dan pemanfaatan tanah adat untuk kesejahteraan masyarakat. <p>2.Peran koordinasi dan pengawasan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah supaya proyek pembangunan (infrastruktur, pelabuhan, dll.) selaras dengan kearifan lokal dan tidak melanggar hak tanah adat.• Bekerja sama dengan lembaga seperti Ombudsman dan MRP untuk mengakselerasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat dan mencegah mal-administrasi dalam pelayanan yang menyangkut tanah ulayat. <p>3.Peran fasilitasi di tingkat lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi dialog antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat, termasuk dukungan terhadap pemetaan wilayah adat dan sidang adat sebagai basis perlindungan hak tanah.• Menjadi kanal aspirasi dan advokasi kebijakan ketika terjadi konflik/pelanggaran hak tanah adat, lalu meneruskan dan mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam rekomendasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
--	---

Kesimpulan Keseluruhan Kegiatan Pokja BPP Papua Polhukam Bulan Maret 2026 :

Pelaksanaan kegiatan Pokja BPP Papua Polhukam selama bulan Januari hingga Maret 2026 menunjukkan bahwa fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua telah berjalan secara aktif dan strategis. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan mencerminkan upaya nyata dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Dalam aspek penegakan hukum, koordinasi penanganan tambang ilegal di Keerom menegaskan pentingnya kolaborasi lintas aparat penegak hukum dan instansi teknis untuk menjamin kepastian hukum, efek jera, serta pencegahan aktivitas ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Pada aspek pembangunan, pelaksanaan rapat koordinasi sinkronisasi RAPP dan percepatan program PSR menunjukkan adanya penguatan integrasi program pusat dan daerah. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan Papua berjalan terarah, tidak tumpang tindih, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya OAP.

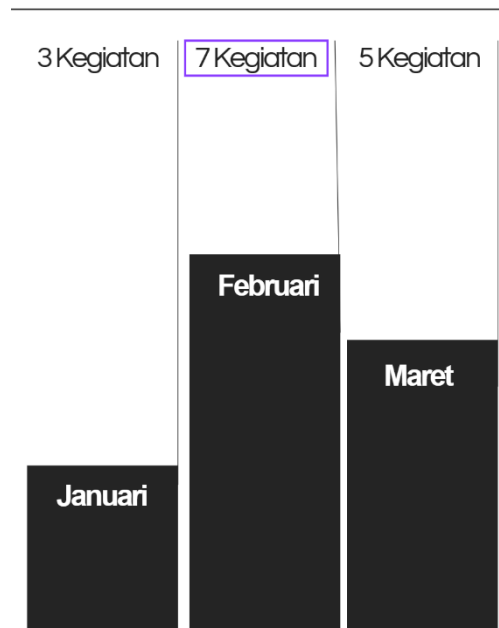
Sementara itu, kegiatan dengar pendapat DPRP kursi Otsus dan sidang adat di Biak Numfor menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dan kultural menjadi kunci dalam penyelesaian persoalan



Papua. Aspirasi masyarakat adat mulai terakomodasi dalam proses kebijakan, dan mekanisme adat semakin diakui sebagai bagian penting dalam penyelesaian konflik, khususnya terkait hak ulayat.

Secara keseluruhan, Pokja Polhukam BPP telah berperan sebagai penghubung strategis antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi di lapangan, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum, efektivitas pengawasan program, serta percepatan regulasi yang berpihak pada OAP.

Dengan demikian, ke depan diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan Otonomi Khusus benar-benar terlaksana secara adil, terintegrasi, dan berkelanjutan demi terwujudnya Papua yang aman, sejahtera, dan bermartabat.



**Realisasi Kegiatan Pokja Polhukam BPP
Perwakilan Provinsi Papua Triwulan I
Tahun 2026**



Januari 2026

1. Menyampaikan hasil Rakornas DPN Gercin untuk penguatan persatuan dan pembangunan Papua menuju Indonesia Emas 2045.
2. Koordinasi Panitia Kongres Pemuda Adat Papua dengan Sekda Papua terkait pelaksanaan di Jayapura.
3. Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Inspektorat Provinsi Papua, BPK Provinsi Papua dan Baperida Provinsi Papua

Februari 2026

1. Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa keluarga Pejuang PEPERA.
2. Menjadi narasumber materi : menjaga rumah besar papua: penguatan peran ondoafi dan kepala suku dalam bingkai BKRI.
3. Menjadi moderator pada kegiatan Rapat Kerja PAK-HAM Papua dan Pelantikan Pengurus PAK-HAM Papua Periode 2026–2029.
4. Rapat bersama DPR Papua.
5. Konektivitas Kerja BP3OKP/BPP Bersama MRP.
6. jaring aspirasi masyarakat adat di kampung tobatu enggros oleh Anggota DPRP Kursi Otsus Bp Ondo Gerson Hasor




Maret 2026

1. Koordinasi hasil penanganan pelaku aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Keerom, Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, Jalan Raya Abepura, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
2. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP.
3. Rapat lanjutan Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom.
4. Kegiatan dengar pendapat Anggota DPRP kursi OTSUS.
5. Sidang Adat dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di lokasi Brim Pewer, Kampung Makmakerbo, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor








Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua
Papua Sehat Perwakilan Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian peran Volunteer Peduli AIDS dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua.2. Koordinasi dan sinkronisasi program berbasis Otonomi Khusus Papua.3. Pembahasan peluang sinergi dan dukungan program antara BP3OKP dan Volunteer Peduli AIDS.	2 Maret 2026	Menyediakan ruang diskusi bagi relawan untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman lapangan, serta tantangan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi penurunan fasilitas kesehatan dan anggaran program HIV/AIDS.• Terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS, terutama pada usia produktif (15–24 tahun).• Akses layanan dan distribusi ARV belum merata, khususnya di daerah terpencil.• Stigma masyarakat terhadap ODHA masih tinggi.• Pemanfaatan dana Otsus sektor kesehatan belum optimal dirasakan.	



2.	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP	(5 – 7 Maret 2026)	Menjadikan RAPPP sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan pembangunan Papua jangka menengah (2025–2029) sebagai turunan dari RIPP 2022–2041. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan program dan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar selaras dengan 19 program prioritas serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).	Tersusunnya daftar program dan kegiatan prioritas RAPPP yang telah selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) dan rencana kerja K/L, termasuk penetapan lokasi, sasaran (OAP), serta pagu indikatif. Selain itu, tercapai kesepakatan teknis terkait tata kelola data dan interoperabilitas sistem (SIPPP, SIPD, SIKD), penguatan kontrak kinerja antara K/L dan pemerintah daerah, serta terbangunnya pemahaman bersama mengenai peran kelembagaan dalam proses sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program percepatan pembangunan Papua.	
----	---	--------------------	--	---	---



3.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	10.00 – 15.00 WIT (7 Maret 2026)	Menyelaraskan dan mempercepat pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Keerom.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi kendala pelaksanaan PSR, seperti administrasi, legalitas lahan, dan kesiapan petani.• Koordinasi antar pemangku kepentingan (pusat, daerah, dan petani) mulai terbangun.• Diperoleh gambaran kebutuhan percepatan implementasi program di lapangan.	
4.	Rapat Internal membahas Perbaikan Pelayanan RSUD Yowari	10.00 – 14.00 WIT (17 Maret 2026)	Membahas upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Yowari.	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasi kendala pelayanan, fasilitas, dan sumber daya manusia.• Muncul sorotan publik terkait pelayanan, khususnya penanganan pasien darurat dan sistem rujukan.• Koordinasi antar fasilitas kesehatan dan internal rumah sakit belum optimal.• Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit perlu diperkuat.	



Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua Provinsi Papua
Papua Sehat Perwakilan Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	1. Penyampaian peran Volunteer Peduli AIDS dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua. 2. Koordinasi dan sinkronisasi program berbasis Otonomi Khusus Papua. 3. Pembahasan peluang sinergi dan dukungan program antara BP3OKP dan Volunteer Peduli AIDS.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan koordinasi lintas instansi dan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah agar dapat memperluas akses layanan kesehatan, tenaga medis, dan distribusi ARV.• Memperkuat edukasi, khususnya bagi generasi muda, serta pendekatan berbasis agama dan budaya.• Mengkoordinasikan mengoptimalkan pemanfaatan dana Otsus untuk program HIV/AIDS secara tepat sasaran.• Mendorong pengurangan stigma melalui sosialisasi dan pendampingan ODHA.
2	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong penetapan RAPPP sebagai rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra PD) pada tingkat provinsi serta kabupaten / kota di wilayah Papua.• Memperkuat peran koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung mandat Komite Eksekutif/tim koordinasi RAPPP di tingkat pusat dan daerah, guna memastikan sinkronisasi program, monitoring realisasi, serta penyelesaian hambatan lintas sektor.• Penguatan fokus program pada isu utama RAPPP, meliputi peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), penguatan ekonomi OAP, pembangunan infrastruktur dasar, serta tata kelola dan keamanan, dengan indikator kinerja yang terukur dan dilaporkan secara berkala.• Pengembangan mekanisme pemantauan bersama (joint monitoring) melalui laporan berkala, dashboard kinerja, serta forum review tahunan RAPPP guna mengevaluasi capaian, kendala, dan penyesuaian program secara berkelanjutan.
3.	Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program PSR di Provinsi Papua di Keerom	<ul style="list-style-type: none">• Mempercepat penyelesaian aspek legalitas dan administrasi lahan.• Memperkuat koordinasi lintas instansi dan pendampingan kepada petani.• Mendorong percepatan penyaluran dukungan pembiayaan dan teknis PSR.• Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala.
4.	Rapat Internal membahas Perbaikan Pelayanan RSUD Yowari	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pada penanganan pasien darurat dan sistem rujukan.• Memperkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan dan internal RS.



		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pengawasan serta evaluasi berkala untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi.• Mendorong transparansi dan komunikasi publik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
--	--	--

Kesimpulan Keseluruhan Kegiatan Pokja BPP Papua Sehat Bulan Maret 2026 :

Pelaksanaan kegiatan Pokja BPP Papua Sehat pada bulan Maret 2026 menunjukkan bahwa upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua telah berjalan melalui berbagai forum koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar, khususnya pada sektor kesehatan, pelayanan publik, serta implementasi program strategis di lapangan. Permasalahan seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, peningkatan kasus HIV/AIDS, belum optimalnya pemanfaatan dana Otonomi Khusus, serta kendala administratif dan koordinasi dalam pelaksanaan program, termasuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), menunjukkan perlunya penguatan intervensi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan juga menghasilkan kemajuan yang signifikan, antara lain meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, tersusunnya program prioritas yang selaras dengan dokumen perencanaan, serta terbangunnya kesepahaman dalam penguatan tata kelola, pemantauan, dan evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan implementasi program berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).



Kesimpulan

Pelaksanaan berbagai kegiatan strategis BP3OKP Provinsi Papua sepanjang bulan Maret 2026 Secara umum, kegiatan bulan ini menunjukkan adanya penguatan koordinasi lintas sektor dan komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua, baik pada sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi program-program prioritas daerah. menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui empat klaster utama, yaitu **Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam**

- Masalah tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan dana Otsus masih menjadi tantangan utama di hampir semua sektor.
- Keterpaduan lintas lembaga dan sektor (pemerintah, TNI/Polri, gereja, dan masyarakat adat) perlu diperkuat agar program sosial, ekonomi, dan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran.
- Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat masih perlu dukungan besar, baik dalam hal anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia.
- Perlu langkah cepat dari pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan audit, evaluasi, dan penataan ulang terhadap pelaksanaan program Dana Otsus, agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan OAP di Provinsi Papua.

Rangkaian rekomendasi, yang dihasilkan menekankan pentingnya penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.

Penutup

Demikian rangkaian pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi koordinasi program kesehatan, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penanganan isu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan perencanaan dan pelestarian budaya di Provinsi Papua. Seluruh agenda tersebut mencerminkan upaya nyata dalam merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.

Melalui kegiatan koordinasi, rapat lanjutan, serta workshop yang telah dilaksanakan, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan, kendala, serta peluang pengembangan program di berbagai bidang. Hal ini menjadi dasar penting dalam mendorong sinkronisasi kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan program, termasuk penguatan peran masyarakat, peningkatan kualitas layanan dasar, serta optimalisasi pelaksanaan program prioritas. Sinergi yang kuat antar sektor diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.



Pada akhirnya, laporan ini diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan **Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan bermartabat**, menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.